

ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BULELENG

Oleh

Made Aditya Wulandari, NIM 2257023001

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buleleng, serta meneliti kesesuaiannya dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2023. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur prosedur telah disusun sesuai regulasi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti, kurangnya sosialisasi atas perubahan regulasi, kesalahan input pada SIPD, ketidaklengkapan dokumen, kendala komunikasi serta belum optimalnya implementasi di lapangan dengan komponen pengendalian internal yang divkemukakan oleh *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) salah satu risiko yang paling rentan terjadi adalah ketika prinsip pemisahan fungsi tidak diterapkan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Prosedur pengeluaran kas mencakup mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), dan Langsung (LS), yang semuanya didukung oleh dokumen administratif seperti SPD, SPP, SPM, SP2D, dan SPJ. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengendalian internal yang berkelanjutan dan peningkatan kompetensi SDM untuk memastikan proses pengeluaran kas berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Temuan ini memberikan kontribusi dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kata-kata kunci: Pengeluaran Kas, Kepatuhan Regulasi, Pengendalian Internal

ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BULELENG

By

Made Aditya Wulandari, NIM 2257023001

Departement of Economics and Accounting

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of cash disbursement systems and procedures at the Public Works and Spatial Planning Office (PUTR) of Buleleng Regency, and to examine its compliance with Buleleng Regent Regulation Number 21 of 2023. The approach used was descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The results showed that although the procedure structure had been prepared in accordance with regulations, in practice there were still various obstacles, such as input errors in SIPD, lack of socialization of regulatory changes, and not optimal application of the principle of separation of functions. The cash disbursement procedure includes the mechanism of Money Supply (UP), Money Replacement (GU), Additional Money (TU), and Direct (LS), all of which are supported by administrative documents such as SPD, SPP, SPM, SP2D, and SPJ. This research highlights the importance of continuous internal control to ensure that the cash disbursement process runs according to applicable regulations. The findings contribute to strengthening local financial governance and regulatory compliance.

Keywords: *cash disbursements, regulatory compliance, internal control.*

